

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional bekerja sama dengan membentuk jejaring internasional yang dikenal dengan jaringan advokasi transnasional. Upaya UNICEF untuk menanggulangi isu pernikahan anak yang dilaksanakan melalui program bernama Accelerate Action to End Child Marriage, sehingga tercipta jaringan kerja sama diantara beberapa aktor transnasional seperti UNFPA, Girls not Brides, Borgen Project, Spotlight Initiative, Zonta International, UNHRC, ECOWAS, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Niger, The Guardian, Aljazeera, studio *Kalangou*, *Voix du Sahel*, dan artis Fa2Maths, Moon Boots, dan Black Gatsby, serta aktor lainnya yang ikut terlibat. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional. Berdasarkan konsep ini terdapat empat indikator aktivitas jaringan transnasional yakni, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Dalam penelitian ini *information politics* ditandai dengan penggunaan media, baik itu media lokal dan internasional sebagai bentuk dukungan untuk mendistribusikan informasi isu pernikahan kepada masyarakat. *Symbolic Politics* diperlihatkan melalui penyebaran makna dan aksi simbolik untuk mengingatkan masyarakat terkait pernikahan anak di Niger. Penggunaan tagar

#EndChildMarriage #IDONT dan #Dayofthegirls digunakan sebagai simbol dan klaim isu pernikahan anak di Niger.

Kemudian *leverage politics*, diidentifikasi melalui *moral leverage* dan *material leverage*. Adapun *moral leverage* terlihat dari dukungan UNFPA untuk perlindungan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan di Niger, dan Human Right Council dalam agenda UPR terhadap pemerintah Niger. Rekomendasi yang diberikan oleh UPR ini, sejalan dengan komitmen UNICEF yang menyatakan keprihatinan mendalam atas tingginya kasus pernikahan yang dilandaskan hukum adat dan KUHP. Untuk *material leverage* dalam jaringan ini telah terpenuhi dikarenakan UNICEF memiliki donor yang diberikan oleh aktor-aktor internasional seperti pemerintah Belgia, Kanada, Belanda, Norwegia, Inggris dan Uni Eropa, serta Zonta International. Selanjutnya, *accountability politics* dapat diidentifikasi melalui terbentuknya Rencana Aksi Nasional tahun 2018 - 2022 untuk mengurangi kehamilan pada remaja dan pernikahan anak dan penandatanganan The Niamey Declaration of ECOWAS First Ladies pada Juli tahun 2019. Jaringan UNICEF juga mendukung pemerintah untuk menjalankan secara efektif hukum yang berkaitan dengan pernikahan anak seperti yang tertuang dalam Keputusan nomor 935 tahun 2 dan Pasal 72 undang-undang nomor 371 tahun 2018.

Keseluruhan bab dalam skripsi ini telah menganalisis upaya UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Upaya UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak dilaksanakan melalui program global bernama Accelerate Action to End Child Marriage, sehingga mampu menciptakan

jaringan kerja sama diantara beberapa aktor. Program Accelerate Action to End Child Marriage juga menghasilkan beberapa perubahan dalam aspek pendidikan dan kesehatan, seperti dibangunnya fasilitas untuk perempuan dan anak perempuan yang putus sekolah di Niger serta terbentuknya Rencana Aksi Nasional Niger tahun (2018-2022).

Dengan demikian, UNICEF telah melakukan empat aktivitas jaringan transnasional dengan semestinya. Meskipun, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi kehamilan pada remaja dan pernikahan anak pada tahun (2018 - 2022) tidak berjalan maksimal, dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa UNICEF dan jejaring transnasionalnya berhasil mengadvokasikan tujuannya yaitu untuk menyejahterakan dan menjunjung tinggi hak anak-anak. UNICEF telah melakukan penanggulangan pernikahan anak dengan baik di Niger.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian ini yakni keberhasilan upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger bahkan mendorong lahirnya kebijakan rencana nasional untuk mengurangi kehamilan pada remaja dan pernikahan anak di Niger. Maka, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut hambatan-hambatan dalam penanganan pernikahan anak di Niger dengan analisis yang lebih kompleks. Dikarenakan dalam penelitian ini belum dibahas hal tersebut.